

PENGELOLAAN PARIWISATA DI KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI

Oleh:
Kiki Rasmala Sani¹ & Mursak²
STISIP Muhammadiyah Sinjai

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengelolaan Pariwisata serta factor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tongke-tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap informan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wisata hutan mangrove Tongke-tongke belum dilakukan dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum jelasnya struktur pengelola sehingga masih terkotak-kotak, baik yang dilakukan oleh KPSDA-ACI, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pihak-pihak tersebut memiliki program masing-masing. Selain itu, untuk pengembangannya, hutan mangrove memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan meskipun tidak dapat terlepas dari factor penghambat seperti pengelolaan yang belum terstruktur dengan jelas, manajemen yang belum efektif, perlunya perbaikan dan penambahan fasilitas pendukung seperti tempat sampah, mesjid, toilet dll. Agar pengelolaan wisata dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan komunikasi antara pemda dan masyarakat dalam pemberlakuan perda. Selain itu, pihak dinas terkait diharapkan dapat bekerjasama dalam mengakomodir perencanaan yang akan dilaksanakan kedepan setelah pengelola kawasan wisata sudah jelas.

Kata kunci: Pengelolaan, Pariwisata, Hutan Mangrove

ABSTRACT

This study is intended to find out about tourism management and the factors that influence tourism management in Sinjai Timur District, Sinjai Regency. This research was carried out in Tongke-tongke Village, Sinjai Timur District, Sinjai Regency. This type of research is qualitative descriptive, which describes the phenomenon in depth through data collection by observation, documentation and in-depth interviews with research informants.

The results of this study indicate that the tourism management of Tongke-tongke mangrove forest has not been done well. This is due to the unclear management structure so that it is still fragmented, both by KPSDA-ACI, the Department of Tourism and Culture, the Environment and Forestry Service and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. These parties have their own programs. In addition, for its development, mangrove forests have a lot of potential that can be utilized even though they cannot be separated from the inhibiting factors such as unclear structured management, ineffective management, the need for repairs and the addition of supporting facilities such as bins, mosques, toilets etc. In order for tourism management to be carried out properly, communication between the local government and the community is needed in the implementation of the regional regulation. In addition, the relevant agencies are expected to be able to cooperate in accommodating the planning that will be carried out in the future after the management of the tourism area is clear.

Keywords: Management, Tourism, Mangrove Forest

PENDAHULUAN

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengelolaan pariwisata di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai serta hambatan dan tantangan yang mempengaruhi perkembangannya. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan yang akan dilakukan dalam mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Sinjai sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur.

Kabupaten Sinjai sebagai salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki berbagai ragam sumber daya alam dan budaya sebagai objek dan daya tarik wisata. Objek wisata dan daya tarik wisata yang ada tersebar di beberapa kecamatan. Salah satu alternatif pengembangan objek wisata dan dapat dijadikan pilihan para wisatawan sebagai daerah tujuan wisata untuk dinikmati khususnya di Kabupaten Sinjai adalah objek wisata yang terkait dengan pariwisata alam. Obyek wisata yang ada pun bervariasi jenisnya, yaitu berupa obyek wisata alam, budaya, bahari, dan wisata boga. Wisata budaya diantaranya adalah Benteng Balangnipa, situs peninggalan sejarah Batu Pake Gojeng, Rumah Adat dan Budaya Karampuang. Wisata alam diantaranya adalah hutan bakao (mangrove) Tongke-Tongke, air terjun dan kolam permandian Baruttung, air terjun kembar dan air terjun Lanta' dan masih banyak yang lain. Wisata bahari diantaranya adalah kepulauan sembilan dan Ujung Kupang sedangkan wisata boga yaitu wisata kuliner di Tempat Pelelangan Ikan di Kelurahan Lappa.

Kabupaten Sinjai belum dicanangkan sebagai kabupaten wisata walaupun sesungguhnya potensi yang dimiliki cukup besar karena hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai memiliki lokasi wisata yang beragam. Hanya saja, yang menjadi masalah adalah pengelolaan objek wisata belum dilaksanakan secara efektif. Fasilitas yang di butuhkan masih belum disediakan sehingga hal ini tidak hanya menjadi salah satu masalah tetapi juga menyebabkan pengunjung masih belum menjadikan Sinjai sebagai destinasi wisata utama dibandingkan dengan kabupaten lain.

Kecamatan Sinjai Timur sendiri memiliki objek wisata yang cukup banyak. Walaupun demikian, barulah beberapa bulan ini objek wisata tersebut menjadi populer di kalangan masyarakat. Padahal beberapa objek wisata tersebut sudah ada sejak lama. Beberapa objek wisata di Kecamatan Sinjai Timur diantaranya adalah kawasan Hutan Mangrove Tongke-tongke, wisata Mangrove di Takkalala, Pantai Ujung Kupang, dan Bukit Vandiam.

Objek wisata tersebut mulai populer seiring dengan mulai gencarnya kalangan muda yang berbagi informasi di situs jejaring (Sosial Media) seperti Facebook dan Instagram. Objek wisata di Kecamatan Sinjai Timur dikelola oleh pemerintah desa. Beberapa tempat juga sudah menarik retribusi parkir dari pengunjung. Padahal tidak ada karcis yang diberikan sebagai tanda bayar retribusi.

Animo masyarakat untuk mengunjungi lokasi tersebut tidak diiringi dengan pengelolaan yang lebih profesional. Padahal jika pengelolaannya dapat diperbaiki, objek wisata ini tidak hanya memberi keuntungan bagi pemerintah kota tetapi juga pemerintah desa. Apalagi jika pengelolaannya

ini dibarengi dengan kapasitas pemerintah desa yang mumpuni. Pengelolaan objek wisata seharusnya dapat menjadi ladang usaha bagi desa yang bisa dijadikan objek pengelolaan BUMDes. Dan hal tersebut tidak hanya bisa dijadikan ladang usaha desa tetapi juga menjadi objek untuk membuka peluang bagi kerjasama antar desa.

Dalam pariwisata, pengelolaan suatu objek wisata sangat diperlukan agar tetap terawat dan terjaga keberlangsungannya. Sehingga dapat diwariskan ke generasi berikutnya dan tetap menjagakeseimbangan alam. Jika potensi wisata yang dimiliki tidak dibarengi dengan niat untuk mengembangkan serta memperhatikan aspek lingkungan dan kenyamanan pengunjung, jelas hal tersebut dapat menimbulkan hambatan bagi perkembangan pariwisata. Oleh karenanya, perlu di analisis terlebih dahulu kejelasan tentang pihak pengelola serta apa saja *Site plan* kedepannya. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata dapat terarah serta dapat diatasi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada objek wisata hutan mangrove Tongke-tongke. Hal ini disebabkan karena kawasan wisata tersebut merupakan ikon andalan pariwisata tidak hanya di Kabupaten Sinjai tetapi juga telah dikenal di Indonesia.

Kawasan wisata hutan bakau ini sejak dulu telah dijadikan sebagai laboratorium alam bagi sejumlah peneliti dikarenakan kekayaan alam dan keindahannya. Sehingga lebih dikenal dengan Laboratorium Alam Sulawesi Selatan. Kawasan hutan bakau Tongke tongke juga pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto saatmenjadi percontohan tentang penyelamatan lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan di kawasan ini antara lain oleh Halidah dkk. (2008) yang melakukan penelitian tentang potensi dan ragam pemanfaatan mangrove di Sinjai Timur. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa potensi tegakan rata-rata mencapai 8,025 pohon/ha dan volume 257,48 m³/ha, sebagian besar masyarakat mengharapkan agar pohon mangrove ditebang untuk penjarangan, dan banyak manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan masyarakat.

Patang (2012) meneliti tentang Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove (Kasus di Desa Tongke-tongke). Hasil penelitiannya bahwa strategi pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Sinjai yaitu masyarakat melakukan penanaman berdasarkan potensi yang ada, membentuk kawasan hutan lindung mangrove yang tidak dapat diganggu, lebih meningkatkan peran organisasi dan masyarakat dan lebih memberdayakan masyarakat, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penebangan mangrove, perlu sentuhan teknologi dalam pengembangan mangrove, masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan tentang mangrove serta peningkatan peran pemerintah, penyuluhan tentang lingkungan dan ekosistem mangrove, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan mangrove, peningkatan pendidikan/pelatihan kepada masyarakat, serta melakukan musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah tentang pemanfaatan dan pengelolaan mangrove, sosialisasi penerapan peraturan pemerintah tentang lingkungan, melibatkan masyarakat dalam dalam

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan mangrove dan peningkatan penanaman mangrove di sekitar pantai.

Putra (2014) meneliti tentang mangrove di Desa Kuala Karang, Kabupaten Kubu Raya. Hutan mangrove di pesisir Desa Kuala Karang rusak akibat dari konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Padahal, hutan mangrove memiliki potensi sebagai aset ekowisata. Perancangan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Kuala Karang bertujuan untuk mendukung upaya dan kegiatan konservasi melalui kegiatan wisata alam dengan memperhatikan unsur edukasi dan peningkatan taraf sosial-ekonomi masyarakat lokal. Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove di Desa Kuala Karang dirancang dengan menggunakan metode perancangan yang melalui tahap gagasan, tahap pengumpulan data, tahap peninjauan lapangan, tahap analisis dan tahap sintesis.

Sedangkan Saputra (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan ekosistem mangrove untuk ekowisata di Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi kawasan ekowisata perlu keterlibatan partisipasi aktif semua pihak terutama masyarakat dalam mengelola ekosistem mangrove untuk ekowisata mencakup dari aspek penanaman, pemeliharaan dan pengawasan.

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan kawasan mangrove untuk dijadikan sebagai kawasan wisata perlu melibatkan masyarakat luas. Dari perencanaan hingga ke pengawasannya. Jika dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat, maka bias jadi masyarakat dapat melakukan kegiatan yang justru dapat merusak kawasan mangrove.

Berdasarkan penelitian tersebut, perlu diadakan kajian tentang pihak pengelola mangrove di Tongke-Tongke agar di dalam proses perencanaan hingga pengawasan dapat terlaksana dengan terstruktur. Dengan kata lain, seluruh pihak yang memiliki kontribusi dapat mengetahui tupoksinya di dalam pengelolaan kawasan wisata di Tongke-tongke.

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi pihak yang mengelola kawasan wisata. Pengelolaan suatu objek wisata sangat diperlukan agar tetap pengelolaan kawasan wisata di hutan mangrove Tongke-tongke sebab terawat dan terjaga keberlangsungannya. Sehingga dapat diwariskan ke generasi berikutnya dan tetap menjaga keseimbangan alam. Selain itu, pengelolaan wisata yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memunculkan konflik dengan masyarakat jika dikaitkan dengan potensi ekonomi yang dimiliki serta konflik kepemilikan lahan dalam pengelolaan mangrove antara pemerinath dan masyarakat.

Jika potensi wisata yang dimiliki tidak di barengi dengan niat untuk mengembangkan serta memperhatikan aspek lingkungan dan kenyamanan pengunjung, jelas hal tersebut dapat menimbulkan hambatan bagi perkembangan pariwisata. Oleh karenanya, perlu di analisis terlebih dahulu kejelasan tentang pihak pengelola serta apa saja *Site plan* kedepannya. Dengan demikian, pengelolaan pariwisata dapat terarah serta dapat diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data.

Pemilihan informan sebagai sumber data penelitian menggunakan teknik snowball sampling. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Bodgan dan Biklen dalam Sugiyono (2003:9)). Maka nantinya hasil penelitian ini merupakan hasil deskriptif dari orang-orang yang diteliti yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan objek wisata di Kecamatan Sinjai Timur.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Penelitian ini dimulai pada tahun 2018

3. Informan Penelitian

Informan penelitian di tentukan berdasarkan pertimbangan atas orang yang memiliki kaitan atau mengetahui tentang objek yang diteliti yakni :

- a. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai
- b. Pemerintah Desa Setempat
- c. Masyarakat di Kecamatan Sinjai Timur
- d. Anggota KPSDA-ACI
- e. Pengunjung Objek Wisata
- f. Pihak Ketiga (pengelola, *Jika Ada*)

4. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi focus pada penelitian ini adalah pengelolaan hutan mangrove tongke-tongke dalam hal ini mulai dari apa yang mendasari sehingga ada hutan bakau sampai pada akhirnya menjadi tempat wisata.

5. Tahapan dalam Penelitian

Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Observasi* (pengamatan) dalam penelitian ini, adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti akan merekam/mencatat (baik secara terstruktur maupun semistruktur) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian, meliputi pelayanan izin mendirikan bangunan dan fenomena-fenomena lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b. *Desain penelitian*, pengembangan desain penelitian sesuai dengan isu-isu yang berkembang atau *up to date* yang berkaitan dengan fokus dan lokus penelitian

- c. *Tahap persiapan* berupa penyusunan pedoman wawancara dan penyiapan instrumen penelitian yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian.
- d. *Pengumpulan data*, yaitu mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui observasi secara langsung dilapangan serta melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan orang-orang yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan.
- e. *Pengolahan data*, yakni proses identifikasi data serta pembuatan rekapitulasi hasil pengamatan dan hasil wawancara dalam bentuk matriks untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi data
- f. *Analisis data* dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, pengumpulan informasi melalui wawancara dengan informan dan studi dokumen. Tahap kedua, yaitu data akan direduksi, dimana peneliti akan memilih, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang dibutuhkan sehingga peneliti dapat melakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang diperoleh. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.
- g. *Pembuatan laporan*, adalah merupakan kegiatan akhir dari segala rangkaian penelitian. Sebagai bentuk akuntabilitas dari peneliti kepada pihak yang berwenang untuk memberikan penilaian terhadap hasil akhir dari penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan ada beberapa pengelola di hutan mangrove Tongke-Tongke, yaitu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam – Aku Cinta Indonesia (KPSDA-ACI), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kabupaten Sinjai.

1. KPSDA-ACI

Awal mula dari dibakukannya KPSDA-ACI ini hanya dijadikan sebagai suatu kelompok yang memang untuk melestarikan tanaman mangrove dari masing-masing yang telah ditanam oleh para warga, tujuannya adalah agar supaya apa yang telah ditanam tersebut ada yang merawat dan bisa tetap dilestarikan dan sebagaimana tujuan utama dari penanaman mangrove tersebut sebagai pencegah terjadinya abrasi pada daerah atau sekitaran pantai tersebut.

2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Oleh: Kiki Rasmala Sani¹ & Mursak²

Bentuk kegiatan Pengelolaan oleh Dinas Pariwisata mulai diefektifkan menjelang akhir 2017. Dimulai dengan pembahasan mengenai pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2017 sebagai perubahan kedua atas Perda No. 19 Tahun 2012 tentang retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga sedang menyusun rencana pengelolaan selanjutnya dengan berkoordinasi dengan KPSDA-ACI.

Perda Nomor 6 Tahun 2017 memuat mengenai struktur tarif atau bea masuk fasilitas rekreasi dan tempat olahraga di Kabupaten Sinjai. Yang mana khusus untuk objek wisata Hutan Bakau Tongke-tongke untuk dewasa sebesar Rp. 5000;/orang sedangkan anak-anak Rp. 3000;/orang. Hanya saja, biaya tersebut belum termasuk biaya parkir pengunjung. Untuk biaya parkir dibebankan sebesar Rp. 2000; / motor dan tidak terdapat bukti pembayaran untuk parkir.

Pemberlakuan perda tersebut kemudian menimbulkan berbagai spekulai dan tidak sedikit masyarakat menilai pemberlakuan perda tersebut kemudian mengebiri kewenangan masyarakat yang selama ini mengelola kawasan wisata. Sejak lama hutan bakau ini telah dijadikan sebagai ikon wisata namun, pemberlakuan perda tersebut baru pada akhir 2017. Otomatis, biaya retribusi masuk tidak lagi diambil oleh masyarakat yang selama ini berprofesi sebagai tukang parkir (biaya parkir dan biaya masuk dahulu di kelola warga setempat yang memanfaatkan lahannya sebagai area parkir) tetapi kini menjadi milik pemerintah. Walaupun yang bertugas untuk menerima dan memberi karcis masuk adalah orang yang sama.

Oleh karena itu, perlu pendekatan dan pembahasan yang lebih komprehensif yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan masyarakat sekitar dalam rangka meningkatkan pengelolaan lokasi wisata hutan bakau tongke-tongke tersebut.

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan bantuan yang besar bagi pembangunan fasilitas di area Hutan Mangrove Tongke-tongke. Hal ini dilakukan mengingat kawasan hutan mangrove Tongke-tongke sejak lama telah dijadikan sebagai lokasi penelitian bagi banyak kalangan, baik mahasiswa dari dalam negeri maupun luar negeri. Daerah ini pernah menjadi sasaran Field Work Program (FWP) kerjasama tim jaman International Cooperation Agency (JICA) dan Ausaid karena keindahan alam dan biota laut. Kekayaan alam di Tongke-tongke ini kemudian lebih dikenal dengan Laboratorium Alam Sulawesi Selatan. Di sana kemudian dijadikan sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) dengan 20 Rencana Fasilitas (2015) yang diperlihatkan secara gamblang dipintu gerbang masuk area hutan mangrove.

Adapun 20 rencana fasilitas PRPM itu terdiri dari:

- a. Pintu gerbang
- b. Tracking mangrove

- c. Gazebo
- d. Kantor pengelola
- e. Genset
- f. Study mangrove
- g. Mushollah
- h. Kios
- i. Playground
- j. Souvenir shop
- k. Cafeteria
- l. Menara pengawas
- m. Cottage
- n. Dermaga wisata perahu
- o. Dermaga utama
- p. Area pemancingan
- q. Area pembibitan
- r. Pos pengamanan
- s. Parker pengelola
- t. Parkir pengunjung.

Hingga saat ini, dari 20 rencana tersebut, saat ini yang terealisasi hanya ada 3. Selanjutnya, masih dalam proses penyusunan proposal pengelolaan dana suntuk merealisasikan rencana-rencana lainnya. Hal itu dilakukan untuk direalisasikan dengan cara menyodorkan sebuah proposal bantuan dana pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan cara bertahap yang dipelopori oleh Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam-Aku Cinta Indonesia (KPSDA-ACI).

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pengelolaan hutan mangrove yang ada di Tongke-tongke tersebut, ketika kita merujuk awal mula terbentuknya KPSDA-ACI, maka sangat jelas peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa namanya juga kelompok pelestari berarti ada tanaman yang akan dilestarikan selain dari fungsi utama dari penanaman bakau tersebut.

Penetapan kebijakan pelarangan penebangan hutan mangrove oleh pemerintah bertujuan agar hutan mangrove yang ada saat ini dijaga keberadaannya agar tetap lestari guna kepentingan masyarakat setempat.

Sebelum kebijakan pemerintah daerah menetapkan pelarangan penebangan hutan mangrove swadaya masyarakat di Tongke-Tongke, terlebih dahulu telah diterapkan aturan lokal melalui penetapan sebagian lahan mangrove masyarakat sebagai Hutan Kesepakatan Desa yang tidak boleh

diganggu dan dijamah oleh siapapun. Masyarakat setempat sudah tidak lagi memanfaatkan mangrovenya secara bebas. Kemudian tahun 1999, pemerintah daerah menetapkan kebijakan pelarangan penebangan mangrove yang diatur dalam Perda No. 8 Tahun 1999.

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan lebih bersifat strategi dalam penyelamatan lingkungan pantai dari amukan ombak, hempasan badai, dan abrasi pantai.

Pada tahun 2008, Penetapan ini menjadi suatu bumerang karena masyarakat akhirnya menjadi apatis untuk menanam mangrove termasuk daerah-daerah di luar kedua desa ini yang menolak merehabilitasi wilayah-wilayah mereka dengan mangrove karena tidak ingin wilayah mereka akhirnya seperti daerah Tongke Tongke dan Samataring yang tidak bisa lagi dimanfaatkan wilayahnya oleh masyarakat. Pemerintah seharusnya lebih bijak dengan mengeluarkan Perda yang tetap mengakomodir keinginan masyarakat dengan tidak melupakan fungsi lindungnya.

Pada umumnya masyarakat Tongke-Tongke menerima kebijakan pemerintah daerah atas larangan penebangan mangrove di lahan mangrove yang mereka lestarikan. Pada sisi lain masyarakat juga merasa diintervensi dalam hal kepentingan, mereka ingin memanfaatkan mangrove miliknya namun terbentur pada aturan pemerintah yang telah menetapkan kebijakan pelarangan penebangan mangrove, kemudian masyarakat merasa kehilangan kebutuhan yang sangat esensial bagi kehidupannya, dimana selama ini masyarakat telah bersusah payah membangun dan melestarikan mangrove secara swadaya tanpa bantuan pemerintah namun tidak dapat dipetik hasilnya. Masyarakat akhirnya menyadari bahwa kebijakan pemerintah daerah yang telah menetapkan larangan penebangan mangrove tersebut juga ada manfaatnya.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN PARIWISATA DI KECAMATAN SINJAI TIMUR

1. Faktor Pendukung

Ada beberapa hal yang mendukung pengembangan wisata hutan mangrove Tongke-Tongke. Diantaranya :

- a. merupakan kawasan konservasi hutan mangrove dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai kawasan hutan mangrove yang dilindungi. Selain itu, kawasan ini juga bisa dipaketkan dengan area wisata lain seperti Pulau Sembilan.
- b. Areanya sangat subur untuk ditumbuhi oleh mangrove.
- c. Flora dan fauna yang hidup di area tersebut menjadi daya tambah tersendiri.
- d. Tingkat pendidikan masyarakatnya yang tergolong tinggi sebagai modal dalam mengembangkan potensi wisata daerah.
- e. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Dengan demikian, masyarakat juga dapat memanfaatkan perahu yang dimiliki untuk menawarkan wisata keliling area menggunakan

perahudan memancing. Pun dapat menyediakan layanan antar kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Pulau Sembilan.

- f. Akses menuju lokasi bagus.
- g. Promosi wisata gencar dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Sebagian besar wisatawan juga berpromosi melalui media social yang turut menambah wisatawan yang berkunjung.
- h. Dengan keindahan dan daya tarik yang dimiliki, lokasi wisata Mangrove Tongke-tongke dapat menjadi destinasi wisata alam dan juga sebagai area untuk mendapatkan pengetahuan tentang mangrove.

2. Faktor Penghambat

Ketika kita kerucutkan pada hutan bakau Tongke-tongke yang kini menjadi salah satu ikon Pariwisata di Kabupaten Sinjai, ada beberapa hal yang menjadi kendala atau penghambat dalam hal pengembangan tempat wisata tersebut adalah: *pertama*, sering timbulnya konflik dan kerusuhan sosial serta situasi dan kondisi politik yang masih memanas, berakibat pada kurang terjaminnya keamanan bagi para wisatawan. Selain itu, penolakan masyarakat akan pengelolaan lokasi wisata oleh pemerintah daerah masih ada sebab mereka khawatir keuntungan yang mereka dapatkan selama ini akan berkurang. Mengingat beberapa masyarakat sekitar area wisata menjajakan makanan dan souvenir di kawasan wisata.

Kedua, masalah pengelolaan terhadap *Mangrove Forest* tersebut belum jelas siapa yang kelola karena masih terjadinya “pengklaiman” dari berbagai instansi atau dinas yang ada di Kabupaten Sinjai. Olehnya itu kalau hal ini masih belum jelas atau belum ditemukan titik terang bagaimana pengelolaan tempat tersebut maka akan menjadi factor penghambat perkembangan dan kemajuan dari hutan mangrove tersebut. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola lokasi wisata tersebut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan berdasarkan Undang-Undang Pariwisata No. 10 tahun 2009, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota, menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; dan mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya. Melalui regulasi ini, maka Dinas Pariwisata memiliki andil didalam pengelolaan wisata. Sedangkan untuk Dinas Kehutanan dan Kelautan, juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan mangrove berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 dan Undang-Undang No. Tahun 1999 dan berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 2007. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada berbagai regulasi tersebut, pengelolaan hutan mangrove menjadi kewenangan beberapa pihak yang tentu saja perlu mengadakan koordinasi secara intens dengan melibatkan masyarakat setempat. Sehingga dalam pengelolaan wisata tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Pemerintah Desa

juga dapat mengelola daerah wisata dalam bentuk BUMDes. Namun, pada kenyataannya, pemerintah desa terkesan tidak terlibat dalam pengelolaan wisata.

Persoalan pengelolaan yang kurang jelas dan kurangnya koordinasi menyebabkan partisipasi masyarakat juga turut menurun. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang seakan tiba-tiba menyebabkan kekhawatiran masyarakat akan “pengambilalihan” lahan dan potensi ekonomi yang selama ini mereka dapatkan dari lokasi wisata tersebut.

Ketiga, sarana dan prasarana yang ada perlu perbaikan dan penambahan. Sesuai dengan master plan kawasan hutan mangrove yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga saat ini sarana penunjang yang akan dibangun baru berjumlah 3 dari 20 rencana. Itupun masih perlu perbaikan lebih lanjut. Misalnya tracking mangrove yang sudah mulai lapuk di beberapa lokasi dan coretan-coretan yang turut mengganggu keindahan, gazebo yang ada justru difungsikan untuk menjual souvenir dan snack, pondok informasi dengan sajian informasi yang minim, kawasan parkir yang sempit serta loket retribusi yang belum digunakan. Sarana penting seperti mesjid, toilet, dan tempat sampah belum ada, sehingga kita akan dengan mudah menemukan sampah di sepanjang tracking mangrove atau di bawah jembatan bertebaran di antara rerimbunan akar bakau.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengelolaan pariwisata di Kecamatan Sinjai Timur perlu diidentifikasi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengingat potensi wisata yang dimiliki begitu besar dan dapat menjadi modal yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi hutan mangrove Tongke-tongke yang besar ini kemudian menimbulkan polemik antara masyarakat dengan pemerintah, mengingat pengelolaannya yang belum terkoordinasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengelola kawasan wisata masih terkotak-kotak oleh KPSDA-ACI (masyarakat), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Walaupun sesungguhnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan adanya Perda No. 8 Tahun 2016 memiliki kewenangan untuk mengelola, namun, masih ada beberapa masyarakat yang khawatir jika hal tersebut justru dapat membawa dampak yang kurang baik terhadap kegiatan yang mereka lakukan selama ini. Mengingat sebagian masyarakat memanfaatkan kawasan untuk menjual souvenir dan makanan di area kafe terapung. Selain itu, jika area hutan mangrove dijadikan sebagai hutan lindung, maka pemanfaatan bakau yang ada menjadi terbatas padahal masyarakat mengklaim adalah pemilik sah dari hutan bakau yang ada di lahan mereka.

2. Saran

Mengingat potensi wisata ilmiah dan wisata rekreasi yang dimiliki hutan Mangrove Tongke-tongke, maka sudah sewajarnya jika dilakukan pembenahan-pembenahan antara lain :

- a. Sosialisasi Perda terhadap seluruh masyarakat di Desa Tongke-tongke.
- b. Perlunya komunikasi secara efektif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan kawasan wisata sehingga dapat dilakukan secara bersama antara pemerinath daerah dan masyarakat agar tidak terjadi gejolak atau rasa khawatir yang timbul di kalangan masyarakat setempat.
- c. Seluruh dinas yang terkait dengan pengelolaan lokasi wisata perlu bermusyawarah dan berdiskusi dengan masyarakat berkenaan dengan pembagian tanggung jawab pengelolaan lokasi wisata sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- d. Pembentukan pengelola kawasan wisata yang jelas dengan tetap melibatkan masyarakat setempat dalam pengorganisasian. Sehingga akan jelas penanggungjawab dan dengan demikian akan lebih memudahkan dalam manajemen pengelolaan serta pengembangan kawasan wisata.
- e. Pengadaan dan pembenahan fasilitas pengunjung seperti perbaikan dan pengecekan tracking secara berkala, pengadaan tempat sampah, mesjid, toilet, dan fasilitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Halidah dkk. 2008. *Potensi dan Ragam Pemanfaatan Mangrove untuk Pengelolaanya di Sinjai Timur Sulawesi Selatan (Mangrove Potencies and Various, Utilization for Forest Management in East Sinjai, South Sulawesi)*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol. V. No. 1 : 67-78 (Online).
- Patang. 2012. *Analisis Strategi pengelolaan Hutan Mangrove (Kasus di Desa Tongke-tongke Kabupaten Sinjai)*. Jurnal Agrosistem Edisi Desember 2012 Vol. 08 No. 2.
- Putra, Winardy. 2014. *Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove Di Desa Kuala Karang Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura Volume 2 / Nomor 2 / September 2014.
- Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025.
- Perda Nmor 06 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Perda Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.